

# **ANALISIS HUBUNGAN GOOD GOVERNANCE DAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA 2013-2019**

**Widjanarko**

*Widyaiswara Pusdiklat Keuangan Umum, BPPK, Kemenkeu, Jakarta*  
*Widjanarko@kemenkeu.go.id*

## **Abstract**

*This study aims to evaluate the relationship between the six variables of Good Governance to the Economic Growth. These variables include : 1) freedom of opinion and responsibility ( Voice and Accountability); 2) Political stability and low level of intensity of violence/Terror (Political Stability and Absence of Violence); 3) Government Effectiveness; 4) Quality regulatory (Regulatory Quality); 5)Supremacy of the Law ( Rule of Law); 6) Control Corruption. This study uses panel data regression method (Random Effect) with five purposive samples of countries whose economic growth is relatively high. These countries are : 1) Vietnam, 2) Singapore; 3) Thailand; 4) Malaysia, 5) Indonesia. The results of the study show two variables are : 1) Voice and Accountability and 2) Political Stability have a significant positive affect to the economic growth.*

**Keywords :** Good Governance; Economic Growth.

## **Abstraksi**

*Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi hubungan enam variabel Tatakelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance ) terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel tersebut antara lain : 1) kebebasan berpendapat dan tanggungjawab ( Voice and Accountability), 2) Stabilitas Politik dan Rendahnya Tingkat Intensitas Tindak Kekerasan/Teror (Political Stability and Absence of Violence), 3) Efektivitas Pemerintahan (Government Effectiveness), 4) Kualitas Peraturan Perundang Undangan ( Regulatory Quality ), 5) Supremasi Hukum (Rule of Law ); 6) Kontrol Korupsi ( Control Corruption). Kajian ini menggunakan metode regresi data panel (Random Effect) dengan 5 purposive sample negara yang pertumbuhan ekonominya relatif tinggi. Negara tersebut yaitu : 1) Vietnam, 2) Singapura, 3) Thailand; 4) Malaysia, 5) Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa dua varibel yaitu : 1)Kebebasan berpendapat dan tanggung jawab dan 2) Kestabilan Politik, berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.*

**Kata Kunci :** Tatakelelola Pemerintahan yang Baik; Pertumbuhan Ekonomi.

## **PENDAHULUAN**

Beberapa kajian ilmiah termasuk dari Bank Dunia menyimpulkan terdapat hubungan signifikan positif antara tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pertumbuhan ekonomi. Menurut Bank Dunia, *good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktifitas usaha (Bank, 1994). Sesuai data *World Governance Indicator (WGI)* Bank Dunia (The World Bank, 2020), enam indikator *good governance* Indonesia tahun 2013-2019 menunjukkan peningkatan pesat. Secara rata rata enam indeks *good governance* Indonesia masih di bawah indeks *good governance* Singapura dan Malaysia. Indeks *good governance* Singapura mendekati skala angka 100. Indeks *good governance* Malaysia di atas 50 (kecuali indeks kontrol korupsi). Namun indeks WGI Indonesia yang mendekati angka 50 (kecuali

kontrol korupsi melebihi angka 50) menunjukkan kemajuan dibandingkan Thailand; Vietnam, Philipina. Sekalipun mempunyai nilai indikator *good governance* yang relatif tinggi mendekati angka 100, Singapura sebagai negara dengan sistem politik otokrasi, mempunyai pertumbuhan ekonomi secara rata rata di bawah 5% dalam tahun 2013-2019. Capaian pertumbuhan ekonomi di bawah 5 % juga diperoleh Thailand yang juga sebagai negara dengan sistem politik otokrasi. Namun Thailand mempunyai indikator *good governance* yang lebih rendah. Vietnam yang juga negara sistem politik otokrasi dengan nilai indikator yang kurang lebih sama dengan Thailand. Namun Vietnam mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Indonesia, Malaysia, dengan sistem politik demokrasi mencapai indikator *good governance* yang tidak setinggi Singapura. Namun Indonesia dan Malaysia mencapai pertumbuhan ekonomi rata rata 5%. Indikator *good governance* dan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan negara ASEAN terpilih dapat dilihat dalam tabel 1.

Tabel 1. Indikator Good Governance dan Pertumbuhan Ekonomi 5 Negara ASEAN 2013-2019.

Negara	Tahun	Y	X1	X2	X3	X4	X5	X6	Polity
Vietnam	2013	5	11	57	46	28	40	39	-7
	2014	6	9	40	51	31	42	41	-7
	2015	7	10	50	55	36	44	42	-7
	2016	6	10	55	54	35	57	38	-7
	2017	7	11	57	53	37	56	31	-7
	2018	7	10	53	53	38	54	38	-7
	2019	7	12	54	54	42	53	34	-7
Singapura	2013	5	51	97	100	100	94	97	-2
	2014	4	46	93	100	100	93	96	-2
	2015	3	41	96	100	100	94	97	-2
	2016	3	41	99	100	100	96	97	-2
	2017	4	41	99	100	100	97	98	-2
	2018	3	42	99	100	100	97	99	-2
	2019	1	39	98	100	100	97	100	-2
Malaysia	2013	5	37	47	79	73	64	67	6
	2014	6	35	58	83	76	74	67	5
	2015	5	34	57	77	74	69	63	5
	2016	4	34	50	76	75	69	60	5
	2017	6	34	51	75	75	64	58	5
	2018	5	41	55	81	74	74	64	5
	2019	4	43	51	79	74	73	63	7

Negara	Tahun	Y	X1	X2	X3	X4	X5	X6	Polity
Thailand	2013	3	34	10	62	58	52	46	7
	2014	1	23	16	65	62	49	39	-3
	2015	3	22	15	66	63	51	37	-3
	2016	3	22	14	66	60	54	42	-3
	2017	4	21	14	67	60	55	43	-3
	2018	4	20	19	67	59	55	41	-3
	2019	2	24	27	66	61	58	39	-3
Indonesia	2013	6	50	28	47	46	37	33	8
	2014	5	52	30	54	50	43	39	9
	2015	5	54	25	45	47	39	39	9
	2016	5	52	32	52	50	40	42	9
	2017	5	51	30	59	52	41	48	9
	2018	5	52	28	59	49	43	46	9
	2019	5	53	28	60	51	42	38	9

Sumber : World Governance Indicator, Bank Dunia, The Piece Systemic Centre.

Gambaran pertumbuhan ekonomi tersebut di atas merupakan sebuah contoh dari fenomena yang menimbulkan pemikiran dari para ahli ekonomi terdahulu untuk mengamati lebih lanjut. Para ahli ekonomi kemudian berpikir tentang faktor-faktor yang menyumbang pertumbuhan ekonomi di luar variabel konsumsi (C), investasi (I), belanja pemerintah (G), ekspor dan impor (X-M). Beberapa ekonom mulai meyakini bahwa variabel *good governance* berpengaruh positif terhadap variabel pertumbuhan ekonomi. Dewasa ini, hubungan *good governance* terhadap pertumbuhan ekonomi, menjadi perdebatan panjang di antara para ekonom. Pengritik kesimpulan hubungan signifikan positif enam *good governance* terhadap pertumbuhan ekonomi, menilai bahwa dua varibel tidak dapat dikorelasikan secara ekonometrika semata-mata. Terdapat faktor lainnya di samping variabel *good governance*. Faktor tersebut yaitu kemampuan keberhasilan suatu negara membangun kapasitas institusi ekonomi dan institusi politik. Pembangunan kapasitas institusi ekonomi dan institusi politik dipengaruhi faktor demografi; sejarah; etnik ras; sumber daya alam; keterbukaan ekonomi (polity2). Kajian ini menambahkan variabel institusi ekonomi dan institusi politik dalam menganalisa hubungan antara *good governance* dan pertumbuhan ekonomi. Sampel kajian difokuskan pada perekonomian Indonesia dan perbandingannya dengan negara ASEAN terpilih selama periode 2013-2019.

## KAJIAN LITERATUR

Peran *good governance* dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi telah sering dikaji dalam beberapa studi pustaka 30 tahun belakangan ini. Beberapa studi ekonometrik dilakukan oleh Daniel Kaufmann and Aart Kraay (2002), Robert J Barro (1996, p. 2). Daniel Kaufman (2010, p. 4) memperkenalkan enam variabel *good governance* yaitu : 1) kebebasan berpendapat dan tanggungjawab 2) *stabilitas politik dan rendahnya tingkat intensitas tindak kekerasan/teror*, 3) *efektivitas pemerintahan*, 4) *kualitas peraturan perundang undangan*, 5) *supremasi hukum*, 6) *kontrol korupsi*. Menurut Kaufmann enam variabel *good governance* tersebut berkorelasi dengan efisiensi pasar dan pertumbuhan ekonomi. Kajian Kaufman tersebut menjadi inspirasi penelitian berikutnya dengan metode regresi.

Noha Emaran dan I Ming Chiu (2016, p. 135) menyimpulkan terdapat hubungan positif antara *good governance* dengan pendapatan per kapita di negara Timur Tengah dan Afrika Utara. Pendapatan per kapita mengalami kenaikan sebesar 2 % bila *good governance* meningkat 1 unit. Md Rafayet Alam dan kawan kawan (2017, p. 5) dalam kajiannya terhadap 81 sampel negara, memberikan bukti empiris bahwa efektifitas pemerintahan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Jean-Baptiste Hanyarimana dan Bertrand Dushimayezu (2018, p. 13) juga memberikan bukti empiris. Kinerja perekonomian yang bagus dan pertumbuhan ekonomi serta pembangunan di Rwanda karena didukung oleh *good governance*. Paitoon Kraipornsak (2018., p. 102) menyimpulkan bahwa *good governance* merupakan faktor krusial dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi di 16 negara berkembang Asia termasuk Indonesia dalam tahun 1996-2016. Menurut Kraipornsak, jika ekonomi berhasil mencapai indeks komposit *good governance* sebesar 1 persen dari tahun lalu, maka hal itu dapat membantu meningkatkan pendapatan per kapita negara Asia dalam sampel sebesar US \$ 31,34 atau 0,54 persen per tahun. Jiandang Liu dan kawan kawan (2018, pp. 1-23) juga menyimpulkan kualitas *good governance* di China mempunyai dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dampak positif tersebut dimungkinkan karena *good governance* mengurangi tekanan kesewenang-wenangan kekuasaan. Tharanga Samarashinge (2018., pp. 33-34) menyimpulkan bahwa kontrol korupsi yang efektif menyumbang pertumbuhan ekonomi di beberapa negara Asia, Afrika dan Amerika Utara. Namun kontrol korupsi yang efektif dan sekaligus menjaga kestabilan politik serta nihilnya terorisme berdampak lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Samarange lebih lanjut menemukan bahwa kebebasan berpendapat, dan kestabilan politik, tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kokou Dzifa dan Kossi Edem Baita ( 2019, p. 2) memberikan bukti empiris bahwa perbaikan *good governance* menyumbang peningkatan pertumbuhan ekonomi, di Sub Sahara Afrika. Menurut Kokou, efektivitas pemerintahan dan supremasi hukum merupakan faktor penting menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi. Muhammad Ramadhan (2019, p. 2596) dengan data 2002-2018 menyimpulkan bahwa enam variable *good governance* memberikan pengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sementara itu, Khan (2007, p. 3) menyebut bahwa sosok Daniel Kaufmann sebagai suatu wakil ekonom liberal yang berorientasi pada pendekatan *enhancing market governance*. Pendekatan tersebut berfokus pada peningkatan tatakelola untuk mendorong peningkatan pasar guna mengurangi biaya transaksi dan memungkinkan pasar bekerja lebih efisien. Menurut Khan, kajian Kaufmann mendapat tantangan dari ekonom heterodox

yang menganggap pasar yang efisien saja tidak cukup. Lebih dari itu, diperlukan peningkatan produktivitas berdasar inovasi teknologi, stabilitas politik dan transformasi yang cepat (*growth enhancing governance*). Namun Kaufmann menganggap bahwa pendekatan *growth enhancing good governance* ekonom heterodox memerlukan suatu peningkatan kapabilitas pemerintah (*growth enhancing government capabilities*). Kajian Khan (p, 8, 21) lebih lanjut menyimpulkan bahwa pendekatan *market enhancing governance* yang diperkenalkan Kaufmann tidak berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kajian Khan mendapat dukungan dari Richard Mira dan Ahmed Hammadache (2017, pp. 234-235). *Good governance* relevan terhadap pertumbuhan ekonomi pada negara yang mempunyai kebijakan ekonomi dan sosial yang memungkinkan pengembangan kelembagaan tata kelola pemerintahan. Rachid Mira yang mengutip kajian Khan menyatakan bahwa terdapat dua kelemahan dalam kajian Kaufmann dan pengikutnya yaitu faktor temporalitas, dan kemampuan politik dan kelembagaan. Indikator *good governance* tahun delapan puluhan dan sembilan puluhan tidak berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan periode yang sama.

Sementara itu, Edy Wibowo (2013, pp. 8-10) menyimpulkan bahwa kebebasan berpendapat dan tanggung jawab, kestabilan politik, kualitas peraturan, kontrol korupsi tidak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di lima negara ASEAN, selama tahun 2011-2017. Hanya variable efektivitas pemerintahan dan supremasi hukum yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Kajian yang sama dilakukan Zhang Zhuo, Sultan Almaki, Bashir Muhammad Sherkan (2020, p. 2) dengan data panel dari 31 negara maju eropa selama periode 2002-2018. Kajian menemukan pengaruh signifikan dari supremasi hukum, kontrol korupsi dan kebebasan berpendapat dan tanggungjawab pada pertumbuhan ekonomi. Kajian Zhang ini juga menemukan pengaruh kenaikan 1% dari efektivitas pemerintahan dan kestabilan politik, serta kualitas peraturan, terhadap penurunan ekonomi.

Pengaruh positif pembangunan institusi dalam medorong pertumbuhan ekonomi di Balkan tahun 2006-2016 disimpulkan oleh Anna Marija dan Krista Bulderberga (2018, p. 33). Kajian Anna tersebut menggunakan data WGI ditambah dengan variabel lainnya. Variable tersebut : a) global competitiveness Index pilar institution, b) indeks makro ekonomi, c) indek demographi, d) *economic freedom*. Puruweti Siyakiya, (2017, p. 16) dengan menggunakan sampel 28 negara Uni Eropa, memberikan bukti bahwa institusi yang berkualitas merupakan pendorong kinerja ekonomi. Kajian yang sama juga dilakukan Chan Phuc Nguyen, Thanh Dinh Su, Thai Vu Hong Nguyen (2018, p. 1952) di 29 negara emerging market tahun 2002-2015. Canh menyimpulkan bahwa kualitas kelembagaan memainkan peran penting dalam mensitumulasi kegiatan perekonomian dan mengakselerasi perumbuhan ekonomi.

Definisi institusi dalam kajian Anna Marija Radzevica dan Krista Bulderberga (2018), Puruweti Siyakiya, (2017); Canh Phuc Nguyen, Thanh Dinh Su, Thai Vu Hong Nguyen (2018), pada dasarnya menggunakan enam indikator *good governance*. Jonathan Lehne, Jeffrey Mo dan Alexander Plekhanov (Jonathan Lehne, Jeffrey Mo and Alexander Plekhanov, 2014) dalam kajiannya di 121 negara termasuk Indonesia membagi indikator *good governance* yang diperkenalkan Kaufmann dalam dua ketegori. Dua kategori indikator tersebut yaitu : a) institusi ekonomi, dan b) institusi politik. Indikator institusi ekonomi tersebut meliputi : i) kualitas peraturan perundang undangan, ii) efektivitas

pemerintahan; iii) supremasi hukum; iv) kontrol korupsi. Indikator institusi politik meliputi : i) kebebasan berpendapat, dan ii) kestabilan politik. Menurut Jonathan, institusi politik mempunyai korelasi terhadap institusi ekonomi. Negara otokrasi pada umumnya mempunyai institusi politik yang lemah dan institusi ekonomi yang lemah (kecuali Singapura). Sebaliknya negara demokrasi mempunyai institusi politik dan institusi ekonomi yang kuat. Namun dalam prakteknya, hubungan tersebut dipengaruhi faktor kekayaan sumber daya alam; sejarah (kolonial), geografi (bencana alam; iklim), ras etnik; keterbukaan ekonomi. Variabel institusi politik ini disimbolkan sebagai polity<sup>2</sup> dalam kajian ini. Indeks polity berkisar dari -10 (sesuai dengan rezim yang sepenuhnya otokratis, seperti monarki) hingga 10 (sesuai dengan demokrasi yang berfungsi baik). Negara-negara dengan skor polity di bawah -5 diberi label sebagai "otokrasi" (Center for Systemic Peace).

## METODE PENELITIAN

Obyek kajian adalah lima negara ASEAN, yaitu Vietnam, Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder. Bentuk data sekunder tersebut berupa data panel yang mengkombinasikan antara data *time series* dan *cross section*. Data *time series* yang digunakan untuk membandingkan perubahan dalam periode 2013-2019. Sedangkan data *cross section* dipakai untuk mengamati variabel enam indikator *good government* lima negara ASEAN. Adapun model ekonometrika yang digunakan dalam kajian ini diadopsi dari riset yang dilakukan oleh Tharanga Samarasinghe, Ilija Stojanović, Jovo Ateljević, R. Stevan Stević (2016), Edy Wibowo sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1it + \beta_2 X_2it + \beta_3 X_3it + \beta_4 X_4it + \beta_5 X_5it + \beta_6 X_6it + \varepsilon_{it}$$

Variabel	Definisi Variabel
(Y) Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat pertumbuhan ekonomi yang dihitung dari Produk Domestik Bruto ( World Development Index (WDI), Bank Dunia).
Unit	Persen (%)
(X1) Kebebasan berpendapat (Voice and Accountability-VA), unit : nilai tertinggi 100.	Menilai persepsi kebebasan berpendapat dan yang menilai persepsi warga negara memperoleh kesempatan memilih pimpinannya, kebebasan menyatakan pendapat dan berorganisasi serta bermedia sosial (WGI,Bank Dunia).
(X2) Stabilitas politik dan kecilnya intensitas tindak kekerasan/teror (PS), unit : nilai tertinggi 100.	Menilai persepsi kemungkinan ketidakstabilan pemerintah atau kemungkinan digulingkan secara inkonsitusional (WGI Bank Dunia).

(X3) Efektivitas pemerintahan ( <i>Government Effectiveness-GE</i> ), unit : nilai tertinggi 100.	Menilai persepsi atas pelayanan publik, kualitas pelayanan oleh Aparatus Sipil Negara (ASN), dan tingkat kebebasannya dari tekanan campur tangan politik (WGI Bank Dunia).
(X4) Kualitas peraturan perundang undangan ( <i>Regulator Quality-RQ</i> ), unit : nilai tertinggi 100.	Menilai persepsi atas kemampuan pemerintah dalam memformulasi kebijakan yang mendukung pengembangan peran sektor swasta (WGI Bank Dunia) .
(X5) Supremasi hukum ( <i>Rule of Law-RL</i> ), unit : nilai tertinggi 100.	Persepsi masyarakat atas kemungkinan terjadinya kejahatan dan sejauh mana masyarakat mampu menghormati aturan, menghormati kontrak, penegakan hak milik dan kepercayaan terhadap peradilan (WGI Bank Dunia).
(X6) Kontrol korupsi ( <i>Control Corruption-CC</i> ), unit : nilai tertinggi 100.	Persepsi jumlah pejabat (yudikatif; legislatif; eksekutif) melakukan korup (WGI Bank Dunia).
$\varepsilon$	Error term.
It	Tahun.

Adapun hipotesa dari kajian ini adalah :

1. *Kebebasan Berpendapat/Voice and Accountability (X1)* berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi;
2. Kestabilan Politik/*Political stability (X2)*, berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi;
3. Efektivitas Pemerintahan/*Government effectiveness (X3)* berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi;
4. *Kualitas Peranturan Perundang Undangan/Regulatory Quality (X4)*) berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi;
5. Supremasi Hukum/*Rule of law (X5)* berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi;
6. Kontrol Korupsi/*Control of corruption (X6)* berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi;

Proses estimasi model persamaan regresi data panel menggunakan program aplikasi Eviews 10. Sesuai tahapan pemilihan metode estimasi persamaan regresi data panel yang paling tepat, kajian menggunakan uji Chow dan Husman. Melalui uji chow, dan uji hausman, diperoleh hasil metode estimasi regresi *random effect*. Variabel independent yang akan diukur pengaruhnya melalui estimasi regresi data panel tersebut yaitu *good governance* dari lima negara ASEAN tahun 2013-2019. Enam variabel tersebut yaitu :

a) Kebebasan Berpendapat (X1), b) Kestabilan Politik (X2), c) Efektivitas Pemerintahan (X3), Kualitas Perundang Undangan (X4), Supremasi Hukum (X5), Kontrol Korupsi (X6).

Sedangkan variabel dependent yang akan di-estimasi perubahannya yaitu pertumbuhan ekonomi (Y) dari lima negara ASEAN tahun 2013-2019. Estimasi pengukuran pengaruh enam variable *good governance* terhadap pertumbuhan ekonomi lima negara ASEAN tersebut, telah dilakukan melalui prosedur ilmiah. Prosedur tersebut meliputi uji asumsi klasik antara lain bahwa sampel memenuhi prinsip normalitas, tidak terjadi hekterokedastisitas, dan tidak terjadi autokorelasi.

Kajian ini menggunakan nilai probabilitas alpha ( $\alpha$ ) = 0.05 yaitu batas maksimal kesalahan yang dijadikan patokan. Apabila nilai signifikansi  $t < 0.05$ , artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikansi  $t > 0.05$ , artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.

## HASIL PEMBAHASAN

Setelah mengestimasi dengan metode *random effect* tentang pengaruh variabel X1, X2, X3, X4, X5, X6, terhadap variabel Y, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 3,958596 + 0,046908 X_1 + 0,056081 X_2 + 0,118779 X_3 - 0,116064 X_4 - 0,003497 X_5 - 0,079165 X_6.$$

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.958596	1.737537	2.278279	0.0305
X1	0.046908	0.020559	2.281568	0.0303
X2	0.056081	0.022099	2.537687	0.0170
X3	0.118779	0.076499	1.552673	0.1317
X4	-0.116064	0.052302	-2.219134	0.0348
X5	-0.003497	0.054829	-0.063788	0.9496
X6	-0.079165	0.043374	-1.825178	0.0787

Sumber : Hasil olah Eviews 10

Variabel	Coeficient	Probabilitas	Diskusi
Pertumbuhan Ekonomi (Y).	3.958596	0.0305	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koefisien intercept dalam model sebesar 3.958596 menunjukkan bahwa bila variabel kebebasan berpendapat dan tanggungjawab, variabel stabilitas politik dan rendahnya tingkat intensitas tindak kekerasan/terror, variabel efektivitas pemerintahan, variabel kualitas peraturan perundang undangan,</li> </ul>

			variabel supremasi hukum, variabel kontrol korupsi, bernilai nol; dan tidak ada perubahan, maka tumbuhan ekonomi adalah sebesar 3,958596.
Kebebasan Berpendapat (X1).	0.046908	0.0303	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai signifikansi dari hipotesa mempunyai probabilitas sebesar 0.0303 yang berarti lebih kecil dari nilai alpha (<math>\alpha</math>) yang ditentukan sebesar 0.05.</li> <li>Artinya bahwa variable kebebasan berpendapat dan tanggung jawab, berpengaruh positif secara signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi;</li> <li>Terdapat cukup bukti empiris untuk menerima hipotesa yang pertama.</li> </ul>
Stabilitas Politik (X2).	0.056081	0.0170	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai signifikansi dari hipotesa dengan probabilitas sebesar 0.0170 yang berarti lebih kecil dari <math>\alpha</math> sebesar 0.05.</li> <li>Artinya variabel kestabilan politik memiliki pengaruh signifikan positif terhadap variabel dependent yaitu pertumbuhan ekonomi.</li> <li>Setiap kenaikan indeks kestabilan politik maka hal tersebut juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.</li> <li>Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat cukup bukti empiris untuk menerima hipotesis yang pertama.</li> </ul>
Efektivitas Pemerintahan (X3).	0.118779	0.1317	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai signifikansi dari hipotesa dengan probabilitas sebesar 0.1317 yang berarti lebih besar dari <math>\alpha</math> sebesar 0.05.</li> <li>Artinya, berapapun indeks efektivitas pemerintahan, hal tersebut tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.</li> <li>Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat cukup bukti empiris untuk menerima hipotesa yang ketiga.</li> </ul>
Kualitas Perundang Undangan (X4).	-0.116064	0.0348	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai signifikansi dari hipotesa dengan probabilitas sebesar 0.0348 yang berarti lebih kecil dari <math>\alpha</math> sebesar 0.05. Artinya, variabel kualitas peraturan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap variabel pertumbuhan ekonomi.</li> <li>Hal itu berarti setiap kenaikan indeks kualitas peraturan maka hal tersebut juga akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.</li> <li>Dengan demikian, tidak terdapat cukup bukti empiris untuk menerima hipotesa yang ke empat. Karena pengaruh kualitas peraturan terhadap pertumbuhan ekonomi mempunyai signifikansi negatif.</li> </ul>

Supremasi Hukum (X5).	-0.003497	0.9496	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai signifikansi hipotesa sebesar 0.9496 yang berarti lebih besar dari <math>\alpha</math> sebesar 0.05.</li> <li>Sehingga dapat diasumsikan bahwa berapa pun indeks supremasi hukum di negara ASEAN, hal tersebut tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.</li> <li>Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat cukup bukti empiris untuk menerima hipotesa yang kelima.</li> </ul>
Kontrol Korupsi (X6).	-0.079165	0.0787	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai signifikansi hipotesa sebesar 0.0787 yang berarti lebih besar dari <math>\alpha</math> sebesar 0.05.</li> <li>Sehingga dapat diasumsikan bahwa berapa pun indeks kontrol korupsi di negara ASEAN, hal tersebut tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.</li> <li>Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat cukup bukti empiris untuk menerima hipotesa yang ke enam.</li> </ul>

Analisa regresi dalam kajian tentang hubungan enam indikator *good governance* dan pertumbuhan ekonomi atas lima negara ASEAN dalam periode 2013-2019, memberikan tiga hasil kesimpulan.

Pertama, kajian menerima dua hipotesis atas pengaruh positif variabel *independent good governance* terhadap variabel dependent pertumbuhan ekonomi. Dua variabel tersebut yaitu kebebasan berpendapat dan tanggungjawab (X1) dan kestabilan politik (X2).

Kedua, kajian menolak empat hipotesis bahwa variabel *independent good governance* berpengaruh secara positif secara significant terhadap variabel dependent pertumbuhan ekonomi. Empat variabel tersebut yaitu efektivitas pemerintahan (X3), variabel kualitas perundang undangan (X4), variabel supremasi hukum (X5), variabel kontrol korupsi (X6).

### Variabel kebebasan berpendapat (X1)

Variabel kebebasan berpendapat (X1) yang berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam kajian di lima negara tahun 2013-2019 sejalan dengan penelitian Tharanga Samarashinge; kajian Zhang Zhuo; Sultan Almaki; Bashir Muhammad Sherkan. Namun kajian ini bertentangan dengan hasil kajian Edy Widodo, dan hasil kajian Tharanga Samarashinge.

### Variabel Stabilitas politik(X2)

Variabel stabilitas politik dan minimnya aksi terorisme (X2) yang berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam kajian di lima negara tahun 2013-2019 bertetangan dengan penelitian Zhang Zhuo; Sultan Almaki; Bashir Muhammad Sherkan, dan kajian Edy Widodo, serta hasil kajian Tharanga Samarashinge.

### **Variabel Efektivitas Pemerintahan (X3).**

Variabel Efektivitas Pemerintahan (X3) tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada lima negara ASEAN dalam kurun waktu 2013-2019 dengan probabilitas 0.1317 yang lebih besar dari  $\alpha$  sebesar 0.05. Hasil kajian ini bertentangan dengan hasil kajian Md Rafayet Alam, dan kajian Edy Widodo, dan kajian Kokou Dzifa dan Kossi Edem Baita. Ketiga kajian tersebut memberikan kesimpulan pengaruh positif variabel efektivitas pemerintahan terhadap pertumbuhan ekonomi.

### **Variabel Kualitas Peraturan Perundang undangan (X4).**

Variabel kualitas peraturan perundang undangan (X4) tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada lima negara ASEAN dalam kurun waktu 2013-2019. Hasil kajian sejalan dengan kajian Edy Wibowo dan kajian Zhang Zhuo dkk.

### **Variabel Supremasi Hukum (X5).**

Variabel supremasi hukum (X5) tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada lima negara ASEAN dalam kurun waktu 2013-2019. Hasil kajian ini bertentangan dengan kajian Edy Widodo di lima negara ASEAN tahun 2011-2017, dan kajian Kokou Dzifa dan Kossi Edem Baita, serta kajian Kajian Zhang Zhuo dan kawan kawan. Kajian Kokou memberikan bukti empiris peningkatan pertumbuhan ekonomi di Sub Sahara Afrika karena perbaikan variabel supremasi hukum. Kajian Zhang Zhuo mengambil sampai 31 negara maju eropa dengan periode 2002-2018.

### **Variabel Kontrol Korupsi (X6).**

Variabel kontrol korupsi (X6) tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada lima negara ASEAN dalam kurun waktu 2013-2019. Hasil kajian atas variabel kontrol korupsi ini sejalan dengan kajian Edy Widodo. Namun bertentangan dengan kajian Zhang Zhuo dan kawan kawan dan hasil kajian Tharanga Samarashinge yang menemukan variabel kontrol korupsi meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Ketiga, hasil kajian atas kebebasan berpendapat dan tanggung jawab, dan stabilitas politik, yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada sampel lima negara ASEAN tahun 2013-2019 ini, terjadi baik dalam pada negara dengan bentuk sistem pemerintahan demokrasi dan autokrasi.

## **PENUTUP**

### **Simpulan dan Saran**

Studi literature melalui estimasi regresi data panel tentang hubungan enam *good governance* terhadap pertumbuhan ekonomi memberikan kesimpulan yang bervariasi. Sebagian besar hasil kajian mendukung kesimpulan Kaufmann bahwa indeks *good governance* mendukung pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya sebagian kajian sebagaimana contoh kesimpulan Khan dan Richard Mira. Variabel *good governance* tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Khan menambahkan bahwa *good governance* dapat efektif sejauh disertai dengan *political will* pembangunan institusi politik dan institusi ekonomi.

Bila ditinjau dari sisi masing masing variabel *good governance*, hasilnya juga bervariasi di antara peneliti. Hasil estimasi dengan menggunakan regresi data panel atas enam variabel *good governance* terhadap pertumbuhan ekonomi, akan tergantung pada faktor periode kajian; jumlah sampel. Oleh karena itu, sekalipun dalam kajian ini, ditemukan empat variabel tidak mendukung pertumbuhan ekonomi, ASEAN, pembangunan institusi politik dan instansi ekonomi, tetap menjadi prioritas. Bagi Indonesia dengan sitim demokrasi yang berhasil dibangun selama lebih dari satu dasawarsa, telah berhasil membawa dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Semua kelembagaan politik yang menjadi pilar utama demokrasi telah tersedia dan terbangun dengan baik. Institusi politik seperti pemilihan Presiden dan anggota parlemen dilaksanakan langsung oleh rakyat. Reformasi peraturan perundangan-undangan untuk meningkatkan kinerja pasar terutama *foreign direct investment* perlu mendapat perhatian serius.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adzima, Kokou and Baita, Kossi. ( 2019). The Impact of Governance on Economic Growth: An Empirical Assessment in Sub-Saharan Africa. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3470607> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3470607>.
- Alam, M. R., Kitenge, E., & Bedane, B. (2017). Government Effectiveness and Economic Growth. *Economic Bulletin*, Vol 37, issues 1 *Economics Bulletin*, 37 (1), 222-227 <https://ssrn.com/abstract=3696166>, [https://www.researchgate.net/publication/312945627\\_Government\\_Effectiveness\\_and\\_Economic\\_Growth/link/5aca15124585151e80a85f18/download](https://www.researchgate.net/publication/312945627_Government_Effectiveness_and_Economic_Growth/link/5aca15124585151e80a85f18/download).
- Anna Marija Radzevica dan Krista Bulderberga. (2018). The Role of Institutional Quality in Economic Growth : Implication for the Baltic Case,. *Stockholm School of Economic*.[https://www.makroekonomika.lv/sites/default/files/2018-06/3\\_viesta\\_Bulderberga\\_Radzevica.pdf](https://www.makroekonomika.lv/sites/default/files/2018-06/3_viesta_Bulderberga_Radzevica.pdf).
- Bank, T. W. (1994). Development In Practice : Governance, the World Bank's Experience. *World Bank Publication*.
- Daniel Kaufmann and Aart Kraay. (2002). Growth Without Government. *World Bank Policy Research Working Paper 2928*,.
- Dushimayezu, J.-B. H. (2018). Good Governance, Economic Growth and Development : Insights from a 22-Year Econometric Analysis in Rwanda. *East Africa Research Papers in Economics and Finance* Nr EARP-EF <https://ju.se/download/18.243bd3a4161b08d5c5817437/1520578294408/EARP-EF%202018-19%20Habyarimana.pdf>, 19.
- Edy Wibowo dan Fery Prasetya. (2013). Analisis Pengaruh Kualitas Pemerintahan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di ASEAN. *Universitas Brawijaya* <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/572>.
- Emara, Noha Emara and Chu, I Ming. (2016). The Impact of Governance of Economic Growth : The Case of Middle Eastern and North African Countries (MENA). *Topics in Middle Eastern and North African Economies, electronic journal*, 18, *Middle East Economic Association and Loyola* <http://www.luc.edu/orgs/meea/>.

- Jiandang Liu; Jie Tang; Bo Zhou; Zhijun Liang. (2018). The Effect of Governance Quality on Economic Growth : Based on China's Provincial Data Panel,. *Economies*, MDPI, Open Access Journal, vol. 6 (4), MDPI, Open Access Journal, vol. 6(4), pages 1-23  
[https://www.researchgate.net/publication/328400550\\_The\\_Effect\\_of\\_Governance\\_Quality\\_on\\_Economic\\_Growth\\_Based\\_on\\_China's\\_Provincial\\_Panel\\_Data/link/5bca96ec1-23](https://www.researchgate.net/publication/328400550_The_Effect_of_Governance_Quality_on_Economic_Growth_Based_on_China's_Provincial_Panel_Data/link/5bca96ec1-23).
- Jonathan Lehne, Jeffrey Mo and Alexander Plekhanov. (2014). What determines the quality of economic institutions? Cross-country evidence,,  
[https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3121122#](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3121122#)  
<https://ssrn.com/abstract=3121122>.
- Kaufmann, K. a. (2010). The Worldwide Governance IndicatorsMethodology and Analytical Issues:. *The World Bank*, <https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Documents>.
- KraiPornsak, P. (2018.). An Investigation of Thailand and Selected Asian Countries,, *Euroasian Jurnal of Economics and Finance, Government and Economic Growth* [https://www.researchgate.net/publication/324448546\\_GOOD\\_GOVERNANCE\\_AND\\_ECONOMIC\\_GROWTH\\_AN\\_INVESTIGATION\\_OF\\_THAILAND\\_AND\\_SELECTED\\_ASIAN\\_COUNTRIES?enrichId=rgreq-368196d36cad90c749d49](https://www.researchgate.net/publication/324448546_GOOD_GOVERNANCE_AND_ECONOMIC_GROWTH_AN_INVESTIGATION_OF_THAILAND_AND_SELECTED_ASIAN_COUNTRIES?enrichId=rgreq-368196d36cad90c749d49).
- Md Rafayet Alam; Erick Kitenge; Bizuayehu Bedane,. (2017.). Government Effectiveness and Economic Growth,. *Economic Bulletin*, Vol 37, issues 1, .
- Muhammad Ramadhan. (2019). Assessing Of The Impact Of Good Governance And Institutions On Economic Growth In Indonesia (2019), .. *International Journal Of Scientific & Technology Research Volume 8* <https://www.researchgate.net/publication/337591491>, 2594-2598.
- Mushtaq H. Khan. (2007). Governance, Economic Growth And Development Since The 1960s. *Desa Working Paper No. 54* [https://www.un.org/esa/desa/papers/2007/wp54\\_2007.pdf](https://www.un.org/esa/desa/papers/2007/wp54_2007.pdf).
- Nguyen, C.P. Su T.D, and Nguyen T.V.H. (2018). Institutional Quality and Economic Growth: The Case of Emerging Economies. *Theoretical Economics Letters*, Vol.8 No.11 <https://doi.org/10.4236/tel.2018.811127>.
- Rachid Mira and Ahmed Hammadache. (2017). Relationship Between Good Governance and Economic Growth. A Contribution to the Institutional Debate About State Failure in Developing Countries. (April 1, 2017). *sian Journal of Middle Eastern and Islamic Studies* [https://www.researchgate.net/publication/326453860\\_Good\\_Governance\\_and\\_Economic\\_Growth\\_A\\_Contribution\\_to\\_the\\_Institutional\\_Debate\\_about\\_State\\_Failure\\_in\\_Middle\\_East\\_and\\_North\\_Africa?enrichId=rgreq-e8f1649](https://www.researchgate.net/publication/326453860_Good_Governance_and_Economic_Growth_A_Contribution_to_the_Institutional_Debate_about_State_Failure_in_Middle_East_and_North_Africa?enrichId=rgreq-e8f1649).
- Robert J. Barro. (1996). Determinants Of Economic Growth: A Cross-country Empirical Study. *NBER Working Paper 5698 NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH* [https://www.nber.org/system/files/working\\_papers/w5698/w5698.pdf](https://www.nber.org/system/files/working_papers/w5698/w5698.pdf).

- Samarasinghe Tharanga. (2018.). The Impact of Governance on Economic Growth,. *MPRA Paper No. 89834*, <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/89834/>.
- Siyakiya, P. (2017). The Impact of Institutional Quality on Economic Performance: An Empirical Study of European Union 28 and Prospective Member Countries. *World Journal of Applied Economics* <https://journal.econworld.org/index.php/econworld/article/view/69/21>.
- Stojanović, I. A. (2016). Good Governance as a Tool for Sustainable Development. *European Journal of Sustainable Development* <http://dx.doi.org/10.14207/ejsd.2016.v5n4p558>.
- The Centre for Systemic Peace <https://www.systemicpeace.org/>. (n.d.).
- The World Bank. (2020). *The World Bank Government Indicator*.
- Zhang Zhuo, Sultan Almalki, Bashir Muhammad, Sherkan. (2020). Underlying the Relationship Between Governance. *Journal of the Knowledge Economy* [https://www.researchgate.net/publication/341893368\\_Underlying\\_the\\_Relationship\\_Between\\_Governance\\_and\\_Economic\\_Growth\\_in\\_Developed\\_Countries](https://www.researchgate.net/publication/341893368_Underlying_the_Relationship_Between_Governance_and_Economic_Growth_in_Developed_Countries). doi:DOI: 10.1007/s13132-020-00658